



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI ADI SAPUTRA
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 418063

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 348 m2/132 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 190.000.000
4. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 90.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ RS SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 71.439.472

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.167.439.472



III. HUTANG

Rp. 149.752.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.017.687.472

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.